

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam beberapa tahun terakhir, dinamika politik di Indonesia menunjukkan semakin kuatnya gejala polarisasi di tengah masyarakat. Pemilihan umum yang seharusnya menjadi ruang untuk kompetisi ide dan gagasan berubah menjadi pertarungan identitas yang memecah warga ke dalam kelompok-kelompok yang berbeda. Perbedaan pilihan politik tidak jarang menimbulkan ketegangan, bahkan pada hubungan yang sebelumnya harmonis. Fenomena ini menunjukkan bahwa kehidupan politik tidak hanya ditentukan oleh preferensi individu terhadap calon atau program, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat untuk menerima perbedaan tersebut secara dewasa.

Dalam situasi yang demikian, toleransi politik menjadi sangat penting. Toleransi politik dapat dipahami sebagai sikap menerima, menghormati, dan mengakui hak orang lain untuk memiliki pandangan politik yang berbeda. Sikap ini bukan hanya soal kesediaan untuk hidup berdampingan dengan pihak yang berbeda, tetapi juga kemampuan untuk menahan diri dari perilaku diskriminatif, prasangka, dan kekerasan simbolik. Di negara dengan keragaman sosial yang tinggi seperti Indonesia, toleransi politik dibutuhkan agar perbedaan pandangan tidak berubah menjadi konflik sosial yang berkepanjangan. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan

di Indonesia, toleransi dipandang sebagai bagian dari perilaku politik kebangsaan, yaitu kesediaan untuk memberikan ruang bagi perbedaan pendapat tanpa menyingkirkan kelompok lain.¹

Dampak dari rendahnya toleransi politik dapat kita lihat dalam berbagai kasus di Indonesia maupun di negara lain. Di Indonesia, misalnya, politik identitas pada beberapa pemilu telah menimbulkan segregasi sosial yang membuat hubungan antarwarga menjadi renggang. Kajian Kompas mencatat bahwa sebanyak 58,4% masyarakat dari beberapa provinsi di Indonesia cenderung memilih dan mempercayai pemimpin yang seagama, hal ini sehingga kelompok minoritas berpotensi tersisih dalam ruang politik.² Kondisi semacam ini melemahkan kohesi sosial dan memberikan ruang bagi munculnya prasangka serta diskriminasi. Di negara lain, seperti Amerika Serikat, polarisasi politik terbukti memiliki dampak yang luas pada kehidupan masyarakatnya. Polarisasi politik membuat warga sulit untuk mempercayai orang dari kubu politik berbeda, sehingga menyebabkan menurunnya kepercayaan sosial dan kerja sama dalam komunitas yang melemah.³ Dampak dari polarisasi ini bahkan terasa hingga ke tingkat keluarga yang memengaruhi dinamika hubungan di dalam keluarga mulai dari harmonisasi hingga komunikasi yang lebih renggang

¹ Sukron Romadhon dan Try Subakti, "Toleransi dan Politik Identitas: Studi tentang Perilaku Politik Kebangsaan di Indonesia," *as-Shahifah: Journal of Constitutional Law and Governance* 2, no. 2 (2022): 45.

² Rini Kustiasih, "Waspadai Intoleransi dalam Sikap Politik", [Kompas.com](https://www.kompas.com), diakses pada tanggal 3 Desember 2025. <https://www.kompas.id/artikel/waspadai-intoleransi-dalam-sikap-politik/>

³ Iyengar, S., Lelkes, Y., Levendusky, M., Malhotra, N., & Westwood, S. J. *The Origins and Consequences of Affective Polarization in the United States*. *Annual Review of Political Science*, 22, 129–146 (2019).

ketika anggota keluarga memiliki preferensi politik yang berbeda-beda.⁴ Kedua contoh ini menunjukkan bahwa tanpa toleransi, perbedaan politik dapat berkembang menjadi ketegangan sosial yang lebih serius.

Karena itu, memahami bagaimana toleransi politik bekerja pada tingkat masyarakat menjadi sangat penting. Toleransi tidak hanya muncul dari pendidikan politik, tetapi juga dari interaksi sosial sehari-hari, nilai budaya, pengalaman hidup bersama, serta modal sosial yang berkembang dalam masyarakat. Ketika sebuah komunitas memiliki mekanisme sosial yang memungkinkan warganya saling menghargai perbedaan, potensi konflik dapat dikurangi. Sebaliknya, ketika relasi sosial rapuh, polarisasi politik mudah berkembang menjadi permusuhan.

Pada konteks inilah Desa Bojong Kulur menjadi menarik untuk dikaji. Wilayah ini dikenal sebagai kawasan yang sangat heterogen dengan penduduk dari berbagai latar belakang agama, etnis, pendidikan, dan status ekonomi. Keragaman tersebut menghadirkan potensi perbedaan pandangan politik yang cukup tinggi. Namun, bagaimana masyarakat Bojong Kulur merespons perbedaan tersebut, apakah melalui sikap toleran atau sebaliknya, masih belum banyak diteliti. Memahami praktik toleransi politik dalam kehidupan sehari-hari di desa ini penting untuk melihat sejauh mana masyarakat mampu menjaga keharmonisan di tengah kompetisi politik yang semakin tajam.

⁴ Chen, M. K., & Rohla, R. *The Effect of Partisanship and Political Advertising on Close Family Ties*. Science, 360(6392), 1020–1024 (2018).

Sebagai salah satu wilayah peri-urban di Kabupaten Bogor, Desa Bojong Kulur terdiri atas berbagai latar belakang agama, suku, status ekonomi, tingkat pendidikan, dan gender yang beragam. Keragaman tersebut menjadikan wilayah ini sebagai representasi kecil dari masyarakat Indonesia yang multikultural. Kondisi Sosial yang demikian memberikan potensi besar bagi tumbuhnya kehidupan demokratis dan sikap saling menghormati antar warga. Namun, di sisi lain, keberagaman ini juga bisa menjadi sumber potensi perbedaan pandangan dalam hal politik di masyarakat, terutama pada momen-momen krusial seperti pemilihan presiden yang sering kali memunculkan polarisasi di masyarakat.

Secara Geografis, Bojong Kulur termasuk dalam wilayah Kecamatan Gunung Putri, yang merupakan salah satu kawasan penyangga antara wilayah perkotaan Jakarta dan kawasan perdesaan di Kabupaten Bogor. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor, kepadatan penduduk Desa Bojong Kulur termasuk yang tertinggi di Kecamatan Gunung Putri, hal ini ditandai dengan banyaknya kompleks perumahan dan kawasan hunian modern yang tumbuh pesat seiring meningkatnya arus urbanisasi.⁵ Karakteristik tersebut menjadikan Bojong Kulur sebagai wilayah dengan ciri sosial ekonomi yang cenderung urban meskipun secara administratif masih berstatus desa.

⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor, *Kecamatan Gunung Putri Dalam Angka 2024*, Bogor: BPS Kabupaten Bogor, 2024, hlm. 7

Dalam konteks kehidupan politik di tingkat lokal, pemilihan presiden tidak hanya dipahami sebagai proses memilih pemimpin nasional, tetapi juga sebagai cerminan perilaku politik warga negara dalam berpartisipasi dan menyikapi perbedaan pandangan politik. Pemilihan presiden menjadi ajang di mana masyarakat berinteraksi secara intensif dalam ruang publik, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Pada saat yang sama, perbedaan pilihan politik sering kali menimbulkan perdebatan, ketegangan, bahkan konflik sosial kecil di antara warga yang sebelumnya hidup rukun. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas demokrasi tidak hanya diukur dari seberapa tinggi partisipasi masyarakat dalam pemilu, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat mampu mempertahankan sikap toleran terhadap perbedaan politik.

Toleransi politik merupakan salah satu pilar penting dalam kehidupan demokratis. Gibson mendefinisikan toleransi politik sebagai kesediaan individu untuk menghormati dan mengakui hak orang lain dalam mengemukakan pandangan politik yang berbeda, bahkan terhadap kelompok yang tidak disukainya.⁶ Dalam konteks masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, toleransi politik menjadi semakin penting karena perbedaan identitas sosial, agama, dan budaya dapat mempengaruhi cara individu memahami serta menilai pilihan politik orang lain. Oleh karena itu, pemahaman terhadap bagaimana masyarakat mempraktikkan toleransi politik di lingkungan yang heterogen menjadi hal yang penting untuk dikaji, khususnya dalam konteks lokal seperti di Desa Bojong Kulur

⁶ Gibson, J. L. (2006). *Political Tolerance and Intolerance in the United States*. The University of Chicago Press.

Beragam penelitian menunjukkan bahwa keragaman sosial dapat menjadi kekuatan sekaligus tantangan dalam kehidupan politik. Casram menegaskan bahwa dalam masyarakat plural, toleransi tidak hanya muncul dari nilai-nilai keagamaan, tetapi juga dari kesadaran sosial yang menumbuhkan empati dan kemampuan memahami perbedaan. Sementara itu, Walter dan Kutlaca dalam penelitiannya di Amerika Serikat menemukan bahwa perilaku tidak sopan politisi sering kali tetap ditoleransi oleh para pendukungnya jika dianggap membela kelompoknya.⁷ Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa identitas sosial dan konteks politik dapat mempengaruhi cara seseorang menilai perilaku politik. Temuan ini relevan untuk dibawa ke konteks Indonesia, di mana loyalitas kelompok dan identitas sosial juga menjadi faktor yang berperan penting dalam menentukan sikap politik masyarakat.

Keragaman sosial budaya yang dimiliki masyarakat Bojong Kulur meliputi perbedaan agama, etnis, ekonomi, pendidikan, dan gender memberikan gambaran tentang kompleksitas hubungan sosial yang terbentuk di dalamnya. Dari sisi agama, masyarakat Bojong Kulur tidak hanya terdiri dari pemeluk satu agama, tetapi juga terdapat komunitas Muslim, Kristen, dan agama lainnya yang hidup berdampingan dalam satu lingkungan. Dari segi etnis, wilayah ini dihuni oleh penduduk dengan latar belakang Betawi, Sunda, Jawa, Minang, Batak, hingga Bugis, yang membawa tradisi sosial dan politik berbeda-beda. Tingkat pendidikan warga pun bervariasi, mulai dari

⁷ Walter, L., & Kutlaca, M. (2023). *Tolerance of Political Intolerance: The Impact of Context and Partisanship on Public Approval of Politicians' Uncivil Behavior*. *Group Processes & Intergroup Relations*, 27(1), 158–177.

lulusan sekolah dasar hingga perguruan tinggi, yang secara tidak langsung berpengaruh pada cara berpikir dan menanggapi isu politik. Sementara itu, perbedaan ekonomi dan gender turut memperkaya cara masyarakat memandang partisipasi politik serta menentukan sejauh mana mereka aktif dalam diskusi atau pengambilan keputusan politik di lingkungan sekitarnya.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Desa Bojong Kulur Berdasarkan Agama

Agama	Jumlah Penduduk	Persentase
Islam	33310	84,2%
Kristen	4209	10,6%
Katolik	1543	3,9%
Hindu	198	0,5%
Budha	297	0,8%
Konghucu	0	0,0%
Lainnya	0	0,0%
Total	39557	100%

Sumber: Website Desa Bojong Kulur

Keragaman sosial seperti ini tentu berpotensi menimbulkan perbedaan pandangan politik, termasuk dalam hal pemilihan calon presiden. Namun, di sisi lain,

perbedaan tersebut juga dapat memperkuat nilai-nilai toleransi politik apabila masyarakat memiliki kesadaran sosial dan budaya yang tinggi. Penelitian Romadhon dan Subakti menunjukkan bahwa politik identitas dapat memunculkan polarisasi, tetapi masyarakat dengan nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas sosial yang kuat cenderung mampu menjaga keharmonisan di tengah perbedaan politik.⁸ Artinya, toleransi politik tidak hanya dipengaruhi oleh faktor kognitif seperti pengetahuan politik, tetapi juga oleh faktor sosial-budaya yang mengakar dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Fenomena yang muncul di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat Bojong Kulur relatif mampu menjaga keharmonisan sosial di tengah kontestasi politik. Meskipun terdapat perbedaan pilihan politik antarwarga, kegiatan sosial seperti gotong royong, kerja bakti, dan peringatan hari besar keagamaan tetap berjalan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai sosial seperti tepa selira, saling menghormati, dan musyawarah masih menjadi landasan interaksi sosial masyarakat. Nilai-nilai tersebut dapat dipahami sebagai bentuk *modal sosial* yang berperan penting dalam menjaga kohesi sosial dan memperkuat toleransi politik. Putnam menyebut modal sosial sebagai jaringan sosial dan nilai-nilai kepercayaan yang memudahkan koordinasi dan kerja sama untuk mencapai tujuan bersama.⁹ Dalam

⁸ Romadhon, S., & Subakti, T. (2023). Toleransi dan Politik Identitas: Studi tentang Perilaku Politik Kebangsaan di Indonesia. *As-Shahifah: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, 5(2), 112–129.

⁹ Putnam, R. D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton University Press.

konteks Jatiasih, modal sosial inilah yang memungkinkan masyarakat tetap bersatu meskipun berbeda pilihan politik.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi dan media sosial turut memberikan tantangan baru bagi kehidupan sosial masyarakat. Informasi politik yang beredar di media sosial sering kali mengandung bias, provokasi, atau ujaran kebencian yang dapat mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap pihak yang berbeda pilihan politik. Hilmy menjelaskan bahwa dalam masyarakat demokratis, hubungan antara warga dan negara harus dilandasi dengan *twin tolerations* yakni toleransi dari pihak masyarakat terhadap negara, dan sebaliknya, toleransi negara terhadap kebebasan masyarakat dalam mengekspresikan pandangan politiknya.¹⁰ Jika salah satu pihak gagal menjalankan prinsip ini, maka yang muncul bukanlah partisipasi yang sehat, melainkan konflik dan kecurigaan sosial. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan tanggung jawab sosial menjadi kunci penting dalam memperkuat toleransi politik.

Dalam konteks Desa Bojong Kulur, fenomena toleransi politik tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai budaya dan keagamaan yang telah lama hidup di masyarakat. Tradisi gotong royong, semangat kebersamaan, dan sikap saling menghargai telah menjadi bagian dari identitas sosial warga. Karang Taruna, lembaga keagamaan, serta organisasi kemasyarakatan turut membantu dalam menumbuhkan

¹⁰ Hilmy, M. I. (2022). *The Twin Tolerations dan Demokrasi di Indonesia dalam Membangun Masyarakat Madani*. *Jurnal Civics Hukum*, 7(1), 45–60.

kesadaran akan pentingnya toleransi dan moderasi dalam kehidupan politik. Upaya-upaya ini memperlihatkan bahwa di tengah tantangan globalisasi dan polarisasi politik, masyarakat Bojong Kulur masih memiliki kekuatan sosial untuk menjaga keharmonisan. Meskipun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji toleransi politik dalam konteks masyarakat lokal seperti Bojong Kulur masih tergolong terbatas.

Kajian mengenai toleransi politik di Indonesia umumnya berfokus pada tingkat nasional atau kajian makro, sedangkan kajian di tingkat mikro, terutama yang menelaah dinamika sosial di wilayah urban majemuk, masih jarang dilakukan. Padahal, pemahaman terhadap toleransi politik di tingkat lokal dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai bagaimana nilai-nilai demokrasi diterapkan secara nyata oleh masyarakat. Dari sinilah pentingnya penelitian ini, yakni untuk memahami bagaimana masyarakat Bojong Kulur memaknai, mengekspresikan, dan menjaga toleransi politik dalam konteks keragaman sosial-budaya yang mereka miliki. Atas dasar hal tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul *“TOLERANSI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILU PRESIDEN 2024: KASUS DESA BOJONG KULUR GUNUNG PUTRI KABUPATEN BOGOR”*.

1.2 Permasalahan Penelitian

Penelitian ini memiliki fokus pada toleransi politik masyarakat dalam konteks pemilihan presiden di Desa Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kab. Bogor.

Penelitian ini membahas secara mendalam mengenai bagaimana masyarakat dengan latar sosial-budaya yang beragam dalam hal agama, ekonomi, pendidikan, suku, dan gender menjalin interaksi sosial di tengah perbedaan pilihan politik. Kajian ini juga menyoroti sejauh mana nilai-nilai sosial dan budaya lokal, seperti gotong royong dan rasa kebersamaan, berperan dalam menjaga harmoni politik di lingkungan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis mengidentifikasi bahwa perbedaan pilihan politik dalam pemilihan presiden seringkali menjadi pemicu ketegangan sosial di masyarakat, terutama pada wilayah yang memiliki tingkat heterogenitas tinggi. Namun, di sisi lain, masyarakat juga memiliki kemampuan sosial untuk mengelola perbedaan tersebut melalui sikap saling menghargai dan menjaga hubungan sosial yang harmonis. Fenomena inilah yang menarik untuk dikaji lebih dalam guna memahami bagaimana bentuk toleransi politik masyarakat terwujud dalam kehidupan sehari-hari serta faktor-faktor sosial dan budaya yang mempengaruhinya. Maka dari itu, penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana masyarakat Desa Bojong Kulur memaknai dan mempraktikkan toleransi politik dalam konteks pemilihan presiden di tengah keragaman sosial-budaya yang dimilikinya?

2. Faktor-faktor sosial dan budaya apa saja yang mempengaruhi tingkat toleransi politik masyarakat Desa Bojong Kulur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana masyarakat Desa Bojong Kulur mempraktikkan toleransi politik dalam konteks pemilihan presiden di tengah keragaman sosial-budaya yang dimilikinya.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi tingkat toleransi politik masyarakat di Desa Bojong Kulur

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian toleransi politik dalam ranah sosiologi politik, khususnya yang berfokus pada dinamika sosial di tingkat masyarakat lokal. Penelitian ini memperkaya khazanah literatur sosiologi politik dengan menghadirkan analisis empiris mengenai bagaimana sikap toleransi politik dibentuk, dipraktikkan, dan dipertahankan dalam konteks

masyarakat yang memiliki latar belakang sosial, budaya, dan identitas yang beragam.

Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu menambah pemahaman akademik mengenai dinamika toleransi politik dalam masyarakat multikultural, terutama dalam menghadapi perbedaan pilihan politik pada momentum politik seperti pemilihan umum. Dengan menelaah interaksi sosial, pola komunikasi, serta respons masyarakat terhadap perbedaan politik, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai relasi antara keberagaman sosial dan stabilitas demokrasi di tingkat lokal.

Lebih lanjut, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji isu-isu terkait pembentukan kohesi sosial, polarisasi politik, serta praktik toleransi dan intoleransi dalam kehidupan politik masyarakat Indonesia. Temuan penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi pengembangan kerangka teoritis maupun pendekatan metodologis dalam studi sosiologi politik, khususnya yang menempatkan masyarakat lokal sebagai ruang penting dalam memahami praktik demokrasi dan toleransi politik di Indonesia.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah, lembaga penyelenggara pemilu, serta organisasi

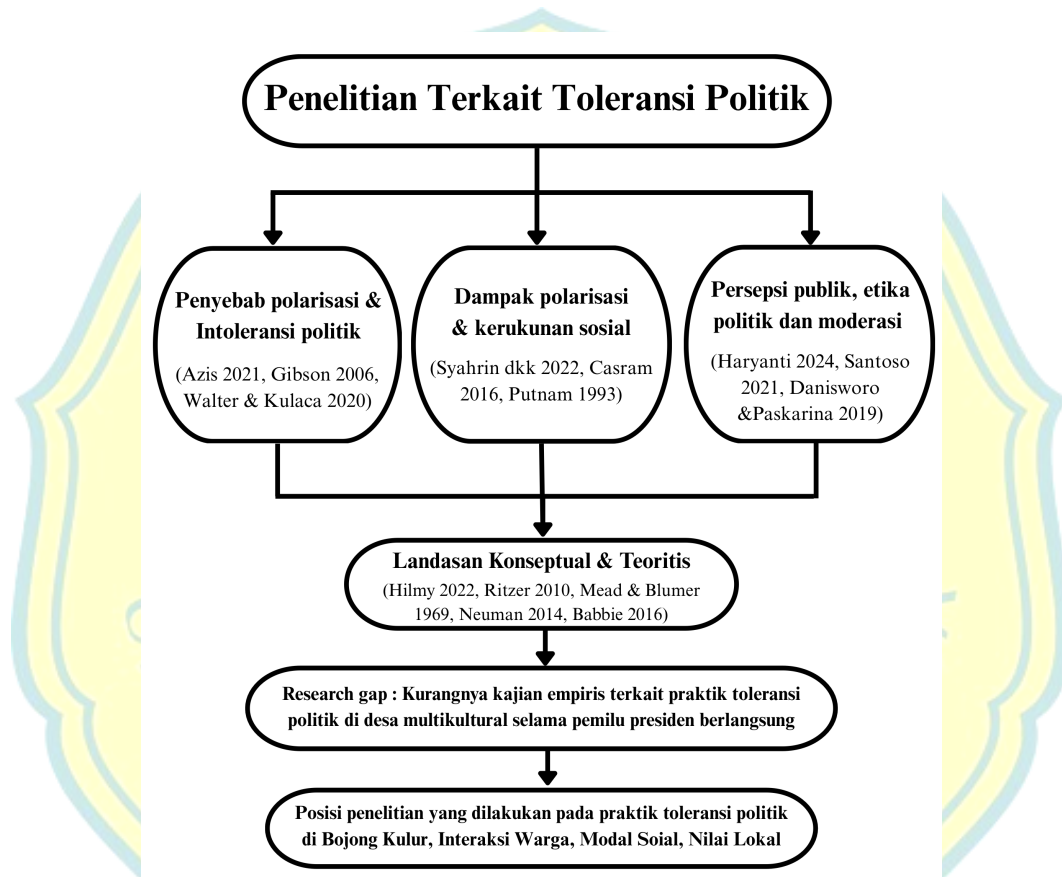
masyarakat sipil dalam merumuskan strategi untuk memperkuat pendidikan politik dan kampanye toleransi di masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi tokoh masyarakat, pemuka agama, dan lembaga lokal dalam mengembangkan program-program sosial yang menumbuhkan nilai-nilai demokratis dan mempererat kohesi sosial di tengah perbedaan pilihan politik.

Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan refleksi bagi masyarakat luas, agar semakin menyadari pentingnya sikap saling menghormati dan keterbukaan terhadap perbedaan politik, sehingga kehidupan sosial di lingkungan lokal seperti Desa Bojong Kulur dapat tetap harmonis, stabil, dan kondusif meskipun diwarnai oleh keragaman pandangan politik.

Intelligentia - Dignitas

1.5 Tinjauan Penelitian Sejenis

Skema 1.1 Tinjauan Penelitian Sejenis



Sumber : Olah Data Penulis, 2025

Tinjauan penelitian sejenis pada studi ini dikelompokkan ke dalam empat kategori sesuai dengan tema utama yang berkembang dalam penelitian terdahulu, yaitu: (1) penelitian mengenai penyebab polarisasi dan intoleransi politik, (2) penelitian yang mengkaji dampak polarisasi terhadap kerukunan sosial masyarakat, (3) penelitian yang membahas persepsi publik terkait etika politik, moderasi, dan

pluralitas, serta (4) penelitian yang memberikan landasan teoritis tentang toleransi politik, modal sosial, dan interaksi sosial. Pengelompokan ini dibuat untuk memperjelas posisi penelitian serta mengidentifikasi ruang kosong (research gap) yang belum dijelaskan secara memadai oleh studi sebelumnya. Adapun pengelompokan tersebut dijelaskan sebagai berikut.

Kategori pertama memuat penelitian-penelitian yang membahas penyebab polarisasi dan intoleransi politik. Penelitian Moch. Azis Qoharuddin menunjukkan bahwa polarisasi tidak hanya terjadi pada ruang publik, tetapi juga merembes ke ranah privat seperti keluarga, di mana perbedaan pilihan politik dapat memicu kekonflikan interpersonal.¹¹ Gibson juga menemukan bahwa intoleransi politik sering dipengaruhi oleh preferensi individu terhadap kelompok yang tidak disukai, sehingga membentuk bias dalam penilaian politik.¹² Sementara itu, Walter dan Kutlaca menegaskan bahwa polarisasi sering diperkuat oleh sikap loyalitas yang emosional terhadap figur politik, di mana pendukung tetap membenarkan ketidaksantunan aktor politik karena identifikasi kelompok yang kuat.¹³ Melalui penelitian-penelitian ini, terlihat bahwa polarisasi muncul akibat interaksi antara identitas politik, afiliasi

¹¹Moch. Azis Qoharuddin. (2021). *Toleransi Politik dalam Masyarakat Multikultural di Indonesia: Studi Kasus pada Pemilu Muda*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Yogyakarta*, 25(2), 134–149.

¹² James L. Gibson. (2006). *Enigmas of Intolerance: Fifty Years after Stouffer's Communism, Conformity, and Civil Liberties*. *Perspectives on Politics*, 4(1), 21–34.

¹³ Walter, Z., & Kutlaca, M. (2020). *Tolerance as a Political Virtue: Intergroup Attitudes and Democratic Commitment in Diverse Societies*. *European Journal of Social Psychology*, 50(3), 467–481.

kelompok, dan dinamika psikologis individu, yang pada akhirnya mendorong fragmentasi sosial.

Kategori kedua berfokus pada dampak polarisasi terhadap kerukunan sosial masyarakat. Penelitian Syahrin dkk. terkait Pilkada Kalimantan Barat menunjukkan bahwa politik identitas dapat melahirkan ketegangan berkepanjangan yang mempengaruhi relasi antar kelompok di tingkat lokal.¹⁴ Penelitian Casram memperlihatkan bahwa kerukunan dalam masyarakat multikultural dipengaruhi oleh nilai sosial-keagamaan yang berfungsi sebagai pedoman dalam merespons perbedaan politik. Selain itu, Putnam menegaskan bahwa modal sosial, baik berupa kepercayaan (trust), jaringan sosial, maupun norma timbal balik (*reciprocity*), merupakan faktor penting yang menjaga kohesi sosial ketika masyarakat menghadapi perbedaan politik.¹⁵ Temuan-temuan dalam kelompok ini menunjukkan bahwa polarisasi bukan sekadar fenomena politik, tetapi memiliki implikasi sosial yang signifikan, terutama terhadap keberlangsungan harmoni sosial dan kualitas relasi antarwarga.

Kategori ketiga mengelompokkan penelitian terkait persepsi publik terhadap etika politik, moderasi, dan pluralitas. Penelitian Haryanti menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap etika para calon presiden berperan dalam menentukan dukungan politik dan tingkat penerimaan terhadap kandidat.¹⁶ Santoso dkk.

¹⁴ Syahrin, A., Nurhadi, A., & Kurniawan, M. (2022). *Dinamika Toleransi Politik di Era Polarisasi Digital: Studi Perilaku Politik Generasi Milenial di Indonesia*. *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah (JPPD)*, 9(1), 55–70.

¹⁵ Robert D. Putnam. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

¹⁶ *ibid.*

membahas bagaimana nilai toleransi dan pluralisme dibangun dalam masyarakat, khususnya dalam konteks interaksi sosial antara kelompok yang beragam.¹⁷ Danisworo dan Paskarina juga menekankan bahwa moderasi politik dan pendekatan demokrasi agonistik diperlukan untuk menjaga ruang dialog antar kelompok berbeda pandangan agar tidak berkembang menjadi konflik terbuka.¹⁸ Penelitian dalam kategori ini memperlihatkan bahwa persepsi terhadap etika politik, nilai pluralisme, serta kemampuan masyarakat dalam mempertahankan moderasi berperan penting dalam menentukan kualitas hubungan sosial dan dinamika politik warga.

Kategori keempat berisi penelitian yang memberikan landasan teoritis terkait toleransi politik, modal sosial, dan interaksi sosial. Hilmy melalui konsep *Twin Tolerations* menekankan keseimbangan antara kebebasan partisipasi masyarakat dan batas peran negara sebagai fondasi demokrasi yang sehat.¹⁹ Ritzer, Mead, dan Blumer memberikan pemahaman bahwa makna sosial termasuk makna toleransi dibangun melalui proses interaksi simbolik, di mana individu menafsirkan tindakan orang lain berdasarkan simbol dan pengalaman interaksional.²⁰ Penelitian Neuman, Babbie, serta Beckert dan Aspers menambahkan bahwa tindakan sosial tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial dan makna yang hidup dalam masyarakat, sehingga analisis mengenai toleransi politik membutuhkan pemahaman atas relasi antara individu, struktur, dan

¹⁷ Santoso, M. A., Prasetyo, D., & Lestari, F. (2021). *Perilaku Politik dan Toleransi dalam Pemilu: Analisis Partisipasi Warga di Daerah Urban*. *Jurnal Demokrasi dan Pembangunan*, 19(1), 45–62.

¹⁸ Danisworo, A., & Paskarina, C. (2019). *Modal Sosial dan Praktik Toleransi Politik di Tingkat Lokal: Studi Kasus di Jawa Barat*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 11(2), 233–248.

¹⁹ Moh. Hilmy. (2022). *The Twin Tolerations dan Demokrasi di Indonesia: Relasi Agama dan Politik dalam Perspektif Pluralisme*. *Jurnal Civics Hukum*, 7(1), 45–60.

²⁰ George Herbert Mead. (1934). *Mind, Self, and Society*. Chicago: University of Chicago Press.

proses interaksi.²¹ Landasan teoritis ini penting untuk memahami bagaimana toleransi politik di tingkat lokal bukan hanya tindakan rasional, tetapi juga hasil konstruksi sosial melalui pengalaman kolektif warga.

Berdasarkan empat kelompok penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu telah menjelaskan polarisasi, kerukunan sosial, persepsi publik, serta kerangka teoritis toleransi politik secara komprehensif. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada konteks nasional atau pasca kontestasi politik. Penelitian mengenai praktik toleransi politik yang berlangsung pada tingkat lokal, terutama di desa multikultural dengan tingkat heterogenitas tinggi seperti Bojong Kulur, masih sangat terbatas. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengkaji bagaimana toleransi politik dibangun dan dinegosiasikan melalui interaksi sosial sehari-hari selama momentum pemilihan presiden. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi celah tersebut dengan mengkaji secara mendalam bagaimana masyarakat Desa Bojong Kulur menjaga harmoni politik, memaknai perbedaan pilihan, dan membangun toleransi melalui jaringan sosial dan nilai budaya setempat.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dikaji, dapat disimpulkan bahwa tema besar mengenai hubungan antara politik dan harmoni sosial telah banyak dibahas dari berbagai sudut pandang, baik dalam konteks politik identitas, etika politik, maupun konflik sosial akibat perbedaan pilihan politik. Namun demikian,

²¹ Neuman, W. Lawrence. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (7th ed.). Boston: Pearson Education.

sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada level makro dan belum banyak yang menyoroti bagaimana praktik toleransi politik terbentuk dan dijalankan di lingkungan masyarakat lokal dengan karakter sosial yang majemuk.

Penelitian ini berupaya melengkapi kekosongan tersebut dengan menempatkan fenomena toleransi politik masyarakat Bojong Kulur sebagai fokus utama kajian. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini tidak hanya menggambarkan persepsi masyarakat terhadap perbedaan pilihan politik, tetapi juga menelusuri bagaimana nilai-nilai sosial seperti gotong royong, solidaritas, dan kesadaran kebersamaan berperan dalam menjaga kohesi sosial di tengah kontestasi politik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan empiris bagi pengembangan kajian sosiologi politik, khususnya mengenai praktik toleransi dan harmoni sosial di tingkat akar rumput.

1.6 Kerangka Konsep

Kerangka konsep dalam penelitian ini berfungsi sebagai panduan teoritis yang menjelaskan hubungan antara konsep-konsep utama yang digunakan dalam menganalisis fenomena toleransi politik di masyarakat Desa Bojong Kulur. Kerangka ini disusun berdasarkan hasil telaah teori interaksionisme simbolik yang dikembangkan oleh George Herbert Mead dan Herbert Blumer, serta didukung oleh konsep modal sosial Robert D. Putnam dan gagasan Casram tentang toleransi dalam masyarakat plural. Melalui kerangka konsep ini, peneliti berupaya menggambarkan

bagaimana interaksi sosial masyarakat berperan dalam membentuk makna dan praktik toleransi politik yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari.

Secara konseptual, hubungan antara elemen-elemen tersebut bersifat dinamis. Proses interaksi sosial menjadi ruang di mana individu saling bertukar simbol, menafsirkan makna politik, serta membangun kesadaran bersama tentang pentingnya menghormati perbedaan pandangan politik. Nilai-nilai sosial seperti gotong royong dan musyawarah berfungsi sebagai modal sosial yang memperkuat praktik toleransi di tingkat komunitas. Dengan demikian, kerangka konsep ini membantu memperjelas arah penelitian, yaitu untuk memahami bagaimana makna toleransi politik dikonstruksi melalui proses interaksi simbolik dan konteks sosial budaya yang ada di masyarakat.

1.6.1 Konsep Toleransi dan Toleransi Politik

Toleransi merupakan salah satu elemen dasar dalam kehidupan sosial, khususnya dalam masyarakat yang ditandai oleh kemajemukan. Dalam pengertian umum, toleransi merujuk pada kemampuan individu ataupun kelompok untuk menerima, menghargai, dan memberi ruang terhadap keberagaman keyakinan, pandangan, serta tindakan yang dilakukan pihak lain, meskipun terdapat perbedaan atau ketidaksepakatan. Toleransi memungkinkan kehidupan sosial berjalan secara damai karena tidak diposisikan sebagai ancaman, melainkan sebagai realitas yang harus dikelola secara bersama.

Pemahaman toleransi dalam tradisi liberal klasik dapat dirujuk pada pemikiran John Locke. Dalam karyanya *A Letter Concerning Toleration*, Locke menegaskan batas kewenangan kekuasaan politik terhadap kebebasan individu sebagai berikut:

*"The care of souls cannot belong to the civil magistrate, because his power consists only in outward force; but true and saving religion consists in the inward persuasion of the mind."*²²

Pandangan Locke tersebut menegaskan bahwa kekuasaan politik tidak memiliki legitimasi moral untuk memaksakan keyakinan atau pandangan kepada individu, karena keyakinan dan nilai moral adalah ranah kebebasan personal yang tidak dapat dicapai melalui penggunaan kekuatan eksternal. Dalam kerangka pemikirannya, pemaksaan justru bertentangan dengan tujuan utama pembentukan masyarakat sipil, yaitu menjaga ketertiban dan menjamin kebebasan individu. Oleh karena itu penggunaan kekuasaan politik sebagai alat untuk mengatur atau menyeragamkan keyakinan dipandang sebagai bentuk penyalahgunaan otoritas yang berpotensi merusak kepercayaan sosial dan kohesi masyarakat.

Toleransi, dalam pemikiran Locke, berakar pada sikap menahan diri dari pemaksaan dan pada penghormatan terhadap kebebasan individu sebagai subjek rasional yang mampu menentukan keyakinan dan pandangannya

²² John Locke. *A Letter Concerning Toleration*. Edited by James H. Tully. Indianapolis: Hackett Publishing, 1983.

sendiri. Sikap menahan diri ini tidak berarti negara atau masyarakat harus menyetujui seluruh pandangan yang berbeda, melainkan menegaskan adanya batas antara kewenangan politik dan kebebasan sipil. Negara hanya berwenang mengatur tindakan-tindakan lahiriah yang berkaitan dengan ketertiban umum, sementara keyakinan dan pandangan pribadi berada di luar jangkauan legitimasi kekuasaan politik.

Lebih jauh, pemikiran Locke menunjukkan bahwa toleransi memiliki fungsi sosial yang penting dalam menjaga kehidupan bersama yang damai dan tertib. Dengan menempatkan kebebasan keyakinan sebagai hak dasar individu, toleransi mencegah penggunaan kekuasaan sebagai alat dominasi atas perbedaan. Dalam masyarakat yang majemuk, prinsip toleransi memungkinkan individu dan kelompok dengan pandangan yang berbeda untuk hidup berdampingan tanpa rasa takut akan penindasan atau diskriminasi yang dilegitimasi oleh kekuasaan.

Konsep toleransi juga dibahas di Indonesia terutama dari segi pluralitas sosial. Zakiyuddin Baidhawiy mengangap toleransi sebagai kemampuan sosial untuk mengelola keberagaman, mengurangi prasangka, serta mencegah perilaku eksklusif yang dikhawatirkan dapat memicu konflik sosial.²³ ia menegaskan jika toleransi tidaklah lahir begitu saja, tetapi

²³ Zakiyuddin Baidhawiy, *Building Harmony and Peace through multiculturalist theology*, Al-Jamiah: Journal of Islamic Studies, 41 (1) 2003

berkembang melalui proses pendidikan, interaksi sosial, dan pengalaman hidup bersama di tengah masyarakat majemuk seperti yang terjadi di Indonesia. Konsep toleransi menjadi lebih spesifik ketika memasuki ranah politik. Dalam hal ini toleransi politik bukan hanya berkaitan dengan penerimaan perbedaan sosial ataupun budaya, melainkan lebih pada bagaimana seseorang atau kelompok bisa menerima hak-hak politik pihak lain, termasuk pada pandangan yang tidak mereka sukai atau yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang dianut. Gibson menjelaskan jika toleransi politik adalah kesediaan seseorang untuk tetap memberikan hak-hak sipil dan politik kepada kelompok yang paling tidak disukai, seperti hak untuk berpendapat, berkumpul, menyampaikan pidato, bahkan hingga turut berpartisipasi dalam proses politik secara aktif.²⁴ sehingga dalam hal ini, toleransi politik dapat dianggap sebagai sikap atau perilaku seseorang atau kelompok dalam menerima pandangan, ideologi, atau pilihan politik yang berbeda tanpa melakukan diskriminasi, kekerasan, ataupun pengucilan sosial.

Toleransi politik tidak hanya menyangkut penerimaan terhadap pihak lain, tetapi juga kemampuan untuk menegakkan keadilan politik melalui kesediaan mengakui keberadaan oposisi dan menghormati kebebasan berekspresi.²⁵ Tanpa adanya toleransi politik, praktik demokrasi akan

²⁴ James L. Gibson, "Political Intolerance and Democratic Value Priorities in Advanced Democracies," *British Journal of Political Science*, 36(3), 2006.

²⁵ Danu Damarjati, "Membentangkan Cakrawala Imajinasi Toleransi Politik," **Detiknews**, 13 September 2024, diakses 5 November 2025, <https://news.detik.com/kolom/d-7537398/membentangkan-cakrawala-imajinasi-toleransi-politik>

kehilangan makna substantif karena perbedaan pandangan akan mudah berubah menjadi polarisasi ekstrem. Perbedaan antara toleransi secara umum dengan toleransi politik telah dijelaskan oleh sejumlah peneliti.

Dalam kerangka budaya politik demokratis, Gabriel Almond dan Sidney Verba menempatkan toleransi sebagai unsur penting yang menopang stabilitas demokrasi. Dalam *The Civic Culture*, mereka menyatakan bahwa:

“The democratic citizen is expected to accept diversity and conflict as normal components of the political process.”²⁶

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam budaya politik demokratis, keberagaman pandangan dan keberadaan konflik tidak dipahami sebagai ancaman terhadap stabilitas sosial, melainkan sebagai konsekuensi wajar dari partisipasi politik warga negara. Almond dan Verba menekankan bahwa warga negara yang demokratis tidak hanya dituntut untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses politik, tetapi juga memiliki sikap psikologis dan nilai-nilai sosial yang memungkinkan perbedaan pandangan dikelola secara konstruktif. Penerimaan terhadap keberagaman dan konflik menjadi bagian penting dari orientasi kewargaan yang menopang keberlangsungan demokrasi.

Dalam kerangka *civic culture*, toleransi berfungsi sebagai mekanisme penyeimbang antara keterlibatan politik dan kohesi sosial. Partisipasi politik

²⁶ Gabriel A. Almond dan Sidney Verba, *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*, Princeton University Press, 1963.

yang tidak disertai sikap toleran berpotensi memicu polarisasi dan konflik yang merusak relasi sosial. Sebaliknya, toleransi memungkinkan warga negara untuk tetap berpartisipasi dalam perdebatan dan kontestasi politik tanpa memandang pihak lain sebagai musuh sosial. Dengan demikian, toleransi berperan menjaga agar perbedaan politik tidak berkembang menjadi konflik sosial yang bersifat destruktif.

Lebih lanjut, Almond dan Verba memandang bahwa budaya politik demokratis tidak hanya dibangun melalui institusi formal, tetapi juga melalui sikap dan nilai yang hidup dalam masyarakat. Sikap menerima keberagaman dan konflik mencerminkan kedewasaan politik warga negara dalam menyikapi perbedaan kepentingan, ideologi, dan pilihan politik. Dalam konteks ini, toleransi menjadi prasyarat bagi terciptanya kepercayaan, kerja sama, dan stabilitas politik jangka panjang, karena warga negara mampu memisahkan perbedaan politik dari relasi sosial sehari-hari.

Sementara itu, John L. Sullivan, James Piereson, dan George E. Marcus menjelaskan bahwa toleransi politik bersifat lebih spesifik. Fokusnya adalah bagaimana masyarakat memperlakukan hak-hak politik dan kebebasan sipil kelompok atau individu yang berbeda pandangan atau kurang populer.²⁷ Sehingga sikap toleran secara sosial, seperti kerelaan hidup berdampingan

²⁷ John L. Sullivan, James Piereson, dan George E. Marcus, *Political Tolerance and American Democracy*, University of Chicago Press, 1993.

atau menghormati perbedaan budaya dan agama, tidak otomatis berarti warga tersebut memiliki toleransi politik. Toleransi politik menuntut komitmen yang lebih tinggi, yaitu memberi ruang dan menghormati hak politik secara setara tanpa diskriminasi, tanpa tindakan represif, dan tanpa eksklusi.

Model pengukuran toleransi politik yang dikembangkan oleh Sullivan dan koleganya menjadi acuan utama dalam penelitian modern. Mereka menggunakan skenario di mana responden harus menyatakan sejauh mana mereka bersedia memberikan hak politik kepada kelompok yang secara pribadi paling tidak mereka sukai, misalnya hak untuk menyampaikan pidato, mengadakan rapat publik, mengajar di sekolah, atau ikut serta dalam pemilu. Jika seseorang menolak memberikan hak-hak tersebut, ia dikategorikan memiliki tingkat toleransi politik yang rendah.

Toleransi politik tercermin dalam sikap warga yang mampu menyikapi perbedaan pilihan dan pandangan politik secara dewasa dan proporsional, dengan tetap mengakui keberadaan pihak lain sebagai bagian yang sah dalam kehidupan bersama, menahan diri dari tindakan pemaksaan, penolakan, maupun perlakuan diskriminatif yang bersifat represif, serta menjaga relasi sosial yang saling menghormati, kooperatif, dan berorientasi pada keberlanjutan hubungan sosial, meskipun perbedaan pandangan politik tersebut hadir secara nyata dan berpotensi memunculkan ketegangan dalam

kehidupan bermasyarakat.²⁸ Pemahaman tersebut sejalan dengan pemikiran Rainer Forst, yang memandang toleransi sebagai relasi normatif yang menuntut pengakuan terhadap pihak lain sebagai subjek yang setara. Forst menekankan bahwa toleransi tidak berarti menghilangkan perbedaan atau meniadakan keberatan terhadap pandangan tertentu, melainkan menuntut adanya pembatasan diri secara moral agar penolakan tersebut tidak diwujudkan dalam bentuk pemaksaan, eksklusi, atau tindakan represif.

1.6.2 Masyarakat Sebagai Entitas Sosial Politik

Masyarakat dapat dipahami sebagai sekelompok orang yang hidup bersama dalam suatu wilayah dan terikat oleh nilai, norma, serta pola hubungan yang relatif stabil. Para ahli juga memberikan definisi yang memperjelas konsep ini. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.²⁹ Sementara Durkheim melihat masyarakat sebagai suatu realitas sosial yang memiliki struktur dan aturan yang mempengaruhi tindakan individu di dalamnya.³⁰ Pemahaman ini menunjukkan bahwa masyarakat bukan sekadar kumpulan individu, tetapi sebuah sistem sosial yang memiliki pengaruh kuat terhadap perilaku politik warganya.

²⁸ Muhammad Nur Prabowo Setyabudi, "Konsep dan Matra Konsepsi Toleransi dalam Pemikiran Rainer Forst," *Jurnal Filsafat Indonesia*, Vol. 3 No. 3, 2020.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 2020

³⁰ Durkheim, Emile. *The Division of Labor in Society*. Free Press, 1997.

Masyarakat pada dasarnya bukan hanya kumpulan individu yang tinggal di satu wilayah, tetapi sebuah entitas sosial-politik yang memiliki struktur, norma, serta jaringan interaksi yang mempengaruhi perilaku politik warganya. Dalam konteks pemilihan umum seperti di Desa Bojong Kulur, masyarakat berperan bukan hanya sebagai pemilih, tetapi juga sebagai kelompok sosial yang turut menjaga iklim politik agar tetap inklusif. Ketika warga terbiasa berinteraksi lintas kelompok, bekerja sama dalam kegiatan lingkungan, dan menjalin relasi yang harmonis, maka perbedaan pilihan politik tidak mudah berkembang menjadi gesekan. Budaya interaksi semacam ini menjadi salah satu fondasi terbentuknya toleransi politik di tingkat lokal.³¹

Kemajemukan masyarakat baik dari segi usia, pendidikan, pekerjaan, etnis, maupun latar keagamaan juga mempengaruhi cara warga memahami dan menyikapi perbedaan politik. Struktur sosial seperti RT/RW, organisasi masyarakat, hingga forum warga dapat menjadi ruang yang mempertemukan berbagai latar sosial tersebut. Interaksi yang rutin terjadi di ruang-ruang komunal inilah yang membuka kesempatan bagi pertukaran gagasan dan pembentukan sikap saling menghormati. Penelitian nasional menunjukkan bahwa warga yang aktif dalam organisasi sosial memiliki tingkat penerimaan

³¹ Nurkhalis, "Modal Sosial dan Toleransi Politik dalam Komunitas Lokal," *Jurnal Politik Indonesia*, Vol. 9 No. 2, 2022.

politik yang lebih tinggi karena mereka lebih sering berinteraksi dengan individu berbeda pandangan.³²

Selain itu, toleransi politik juga sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan politik warga dan akses informasi yang mereka miliki. Pemilih yang memahami proses pemilu, hak politik, serta keberagaman pilihan cenderung mampu menerima perbedaan secara lebih dewasa. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian internasional yang menyatakan bahwa toleransi politik bukan muncul secara tiba-tiba, tetapi merupakan hasil dari proses sosialisasi politik yang berlangsung di lingkungan keluarga, komunitas, dan lembaga sosial.³³ Dengan kata lain, toleransi merupakan produk dari pembelajaran politik yang terus menerus.

Dalam konteks Desa Bojong Kulur, masyarakat menghadapi dinamika politik lokal yang mencakup kampanye, pertemuan warga dengan calon legislatif, aktivitas pemilih, hingga proses penerimaan hasil pemilu. Ketika norma lokal seperti saling menghormati, musyawarah, dan gotong royong masih kuat dijalankan, interaksi politik yang terjadi cenderung berlangsung secara damai meski pilihan berbeda. Sebaliknya, jika akses informasi tidak merata atau struktur sosial melemah, potensi ketegangan politik dapat

³² Lestari, D. "Keterlibatan Sosial dan Sikap Politik Warga di Tingkat Lokal," *Jurnal Sosiologi Reflektif*, Vol. 17 No. 1, 2023

³³ Petersen, M. "Political Socialization and Democratic Tolerance in Local Communities," *Journal of Civic Studies*, Vol. 14 No. 3, 2021.

meningkat terutama pada masa kampanye atau setelah hasil pemilu diumumkan..

1.6.3 Pemilihan Umum sebagai Ruang Interaksi Politik

Pemilihan umum (pemilu) merupakan instrumen paling penting dalam sistem politik demokratis. Pemilu bukan hanya berfungsi untuk menentukan siapa yang akan memegang kekuasaan pemerintahan, tetapi juga menjadi proses sosial dan politik yang membuka ruang interaksi bagi warga negara. Secara yuridis pemilu di Indonesia dipahami sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.³⁴ Hal ini menunjukkan bahwa pemilu bukan hanya sekadar prosedur administratif, tetapi juga merupakan sebuah mekanisme demokrasi dimana seluruh warga negara berpartisipasi dalam menentukan arah politik negara. Dahl menjelaskan jika pemilu adalah inti dari oligarki karena menyediakan dua dimensi penting dalam demokrasi, aksi partisipasi politik yang luas dan kontestasi politik yang kompetitif.³⁵

Pemilu dapat digambarkan juga sebagai sarana legitimasi kekuasaan dan mekanisme memberi kesempatan bagi warga negara untuk menilai

³⁴ KPU di Kota Tangerang: “Pengertian Pemilu”
<https://kota-tangerang.kpu.go.id/page/read/pengertian-pemilu>

³⁵ Hamka Hendra Noer, *Studi Teoritik Pemikiran Demokrasi Modern*, “Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional”, 1 (2) 2019

mengontrol dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan.³⁶ Dalam konteks sosial politik Indonesia, pemilu seringkali menjadi sebuah momen intens dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan selama periode ini interaksi politik di masyarakat meningkat secara signifikan. Peningkatan interaksi politik ini terlihat dalam cara masyarakat mengekspresikan preferensi pilihannya melalui diskusi yang bersifat formal maupun informal baik itu secara langsung ataupun tidak langsung seperti melalui sosial media. Pada tahap ini pemilu berfungsi sebagai ruang interaksi sosial politik yang mempertemukan berbagai aktor, mulai dari warga negara, partai politik, penyelenggara pemilu, media, hingga berbagai organisasi masyarakat sipil. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pemilu dapat memperkuat nilai-nilai demokrasi apabila warga mampu berdialog, bernegosiasi, dan menyampaikan pendapat tanpa memaksakan kehendak. Sebuah Studi yang dilakukan oleh Putri dan Siti Menunjukkan jika kampanye dan kegiatan politik lainnya selama masa pemilu dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk bertukar informasi, dan pengetahuan mengenai isu-isu kebijakan, program kandidat, serta arah pembangunan yang direncanakan oleh calon pemimpin tersebut.³⁷ Selain berfungsi sebagai ruang interaksi di masyarakat, pemilu juga memiliki fungsi representasi. Arend Lijphart menegaskan jika pemilu adalah sarana untuk

³⁶ Yuliani Widianingsih, "Demokrasi dan Pemilu di Indonesia: Suatu Tinjauan dari Aspek Sejarah dan Sosiologi Politik," *Signal* Vol. 5 No. 2. 2017.

³⁷ Putri Yunita dan Siti Tiara Maulia, "Pemilihan Umum Sebagai Bentuk Perwujudan Demokrasi di Indonesia" *Journal of Practice Learning and Educational Development (JPLED)* Vol. 4 No. 2 (2024)

memastikan beragam kelompok sosial yang ada di masyarakat dapat memiliki wakil politik yang sesuai dengan aspirasi mereka.³⁸

1.6.4 Teori Interaksi Simbolik Herbert Mead dan Blumer dalam Konteks Toleransi Politik

Teori interaksionisme simbolik merupakan salah satu perspektif sosiologi yang menitikberatkan pada makna subjektif dan proses interaksi sosial antarindividu. Teori ini pertama kali dikembangkan oleh George Herbert Mead, yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Herbert Blumer. Menurut Mead dalam karyanya *Mind, Self, and Society*, manusia memahami realitas sosial bukan hanya melalui stimulus fisik, tetapi melalui simbol-simbol bermakna yang digunakan dalam interaksi sosial.³⁹ Bahasa dan simbol menjadi medium utama dalam pembentukan “self” (diri) dan “society” (masyarakat). Mead menegaskan bahwa diri manusia terbentuk melalui proses sosial di mana individu belajar menempatkan dirinya dalam perspektif orang lain dan bereaksi secara spontan terhadap lingkungan sosial. Dengan kata lain, manusia membangun kesadaran dirinya melalui interaksi sosial dan makna-makna yang dikonstruksikan secara kolektif. Dalam pandangan Mead, komunikasi adalah inti dari tindakan sosial karena di dalamnya terkandung

³⁸ Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, (Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan UGM, 2009),

³⁹ Mead, G. H. (1934). *Mind, Self, and Society*. Chicago: University of Chicago Press.

proses pertukaran makna yang melahirkan kesepahaman, konflik, ataupun identitas sosial baru.

Sementara itu, Herbert Blumer melalui bukunya *Symbolic Interactionism: Perspective and Method* merumuskan tiga premis dasar dari interaksionisme simbolik. Pertama, manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna yang dimiliki sesuatu itu bagi mereka. Kedua, makna tersebut muncul dari hasil interaksi sosial antarindividu. Ketiga, makna tersebut disempurnakan dan diubah melalui proses interpretasi ketika individu berinteraksi dengan lingkungannya.⁴⁰ Blumer menolak pandangan deterministik struktural-fungsional yang menganggap perilaku manusia sepenuhnya ditentukan oleh struktur sosial, dan sebaliknya menegaskan bahwa manusia adalah agen aktif yang menafsirkan simbol-simbol sosial. Realitas sosial dalam perspektif interaksionisme simbolik bersifat dinamis dan terbentuk melalui proses interaksi yang berkelanjutan. Karena itu, teori ini sangat menekankan pada makna, interpretasi, dan interaksi yang menjadi inti dari tindakan sosial manusia.

Dalam konteks toleransi politik, teori interaksionisme simbolik relevan karena memberikan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana individu memaknai perbedaan pandangan politik dan bagaimana makna itu

⁴⁰ Blumer, H. (1969). *Symbolic Interactionism: Perspective and Method*. Berkeley: University of California Press.

terbentuk melalui interaksi sosial.⁴¹ Toleransi politik pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan sistem atau struktur politik, tetapi juga dengan proses sosial di mana individu saling berinteraksi, berkomunikasi, dan menafsirkan simbol-simbol politik yang ada di masyarakat.⁴² Berdasarkan premis pertama Blumer, tindakan individu terhadap pihak lain dalam arena politik sangat ditentukan oleh makna yang mereka berikan terhadap simbol-simbol politik seperti partai, kandidat, ideologi, atau bahkan warna bendera. Misalnya, seseorang yang menganggap simbol partai tertentu sebagai representasi “musuh” atau “ancaman” akan bertindak intoleran, sedangkan seseorang yang memaknai perbedaan politik sebagai bagian dari keberagaman demokrasi akan menunjukkan sikap menghargai dan menerima perbedaan tersebut.

Premis kedua Blumer menunjukkan bahwa makna politik tersebut muncul melalui interaksi sosial. Dalam konteks masyarakat Indonesia, makna toleransi politik dibentuk melalui diskusi antarwarga, perdebatan di media sosial, pengalaman bersama dalam pemilu, dan interaksi di lingkungan sosial yang beragam.⁴³ Jika interaksi politik diwarnai oleh dialog dan saling menghormati, maka makna “berbeda pilihan politik” dapat dimaknai positif

Intelligentia - Dignitas

⁴¹ Gibson, J. L. (2006). *Enigmas of Intolerance: Fifty Years after Stouffer's Communism, Conformity, and Civil Liberties. Perspectives on Politics*, 4(1), 21–34.

⁴² Walter, Z., & Kutlaca, M. (2020). *Tolerance as a Political Virtue: Intergroup Attitudes and Democratic Commitment in Diverse Societies. European Journal of Social Psychology*, 50(3), 467–481.

⁴³ Romadhon, S. & Subakti, T. (2023). Toleransi dan Politik Identitas: Studi tentang Perilaku Politik Kebangsaan di Indonesia. *As-Shahifah*, 5(2), 112–129.

sebagai bagian dari dinamika demokrasi.⁴⁴ Sebaliknya, jika interaksi sosial didominasi ujaran kebencian atau polarisasi, makna tersebut bisa bergeser menjadi negatif dan memunculkan intoleransi.⁴⁵ Premis ketiga Blumer menegaskan bahwa makna sosial selalu terbuka untuk diubah.⁴⁶ Hal ini menunjukkan bahwa toleransi politik bersifat dinamis ia dapat tumbuh ketika individu terlibat dalam pengalaman politik yang menumbuhkan empati, saling memahami, dan kesadaran akan pentingnya keberagaman.⁴⁷

Dengan demikian, meminjam kerangka interaksionisme simbolik berarti melihat toleransi politik sebagai hasil dari proses sosial dan interpretasi makna. Individu tidak serta-merta lahir dengan sikap toleran atau intoleran, tetapi membentuknya melalui pengalaman interaksi sehari-hari.⁴⁸ Penelitian yang menggunakan teori ini dapat menelusuri bagaimana simbol-simbol politik dimaknai oleh warga, bagaimana mereka memandang pihak lain yang berbeda pilihan, dan bagaimana proses komunikasi dapat mengubah atau memperkuat sikap politik tertentu.⁴⁹ Sebagaimana dijelaskan oleh Ritzer & Goodman interaksionisme simbolik memberikan fokus pada makna yang diciptakan melalui interaksi mikro, yang pada akhirnya membentuk struktur

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Hilmy, M. I. (2022). *The Twin Tolerations dan Demokrasi di Indonesia*. *Jurnal Civics Hukum*, 7(1), 45–60.

⁴⁶ Blumer, H. (1969). *Symbolic Interactionism: Perspective and Method*. Berkeley: University of California Press.

⁴⁷ Mead, G. H. (1934). *Mind, Self, and Society*. Chicago: University of Chicago Press.

⁴⁸ Gibson, J. L. (2006). *Enigmas of Intolerance. Perspectives on Politics*, 4(1), 21–34.

⁴⁹ Walter, Z., & Kutlaca, M. (2020). *Tolerance as a Political Virtue*. *European Journal of Social Psychology*, 50(3), 467–481.

sosial yang lebih luas⁵⁰ Dalam konteks demokrasi, analisis semacam ini membantu memahami bagaimana praktik toleransi politik tumbuh dari bawah dari percakapan, pengalaman, dan makna yang dikonstruksi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.⁵¹ Karena itu, teori interaksionisme simbolik sangat relevan sebagai kerangka konseptual untuk menelaah bagaimana masyarakat menafsirkan dan mempraktikkan toleransi politik di tengah keragaman sosial dan ideologis yang semakin kompleks.⁵²

1.6.5 Modal Sosial

Secara sederhana, modal sosial bisa dipahami sebagai kekuatan yang muncul dari hubungan sosial di antara individu dalam masyarakat, yang dilandasi oleh kepercayaan, nilai, dan kebiasaan bersama. Dalam kehidupan sehari-hari, hubungan antarwarga tidak hanya terbentuk karena kedekatan tempat tinggal, tetapi juga karena adanya rasa saling percaya dan kesadaran bahwa mereka saling membutuhkan satu sama lain. Dari sinilah muncul kerja sama, solidaritas, dan rasa kebersamaan yang pada akhirnya membentuk modal sosial. Jadi, modal sosial bukan sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan lahir dari interaksi sosial yang berlangsung terus-menerus dan dikuatkan oleh nilai-nilai yang hidup di masyarakat.

⁵⁰ Ritzer, G., & Goodman, D. (2004). *Modern Sociological Theory* (6th ed.). New York: McGraw-Hill.

⁵¹ Putnam, R. D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton University Press.

⁵² Mead, G. H. (1934). *Mind, Self, and Society*. Chicago: University of Chicago Press.

Pemikiran Robert D. Putnam menjadi dasar yang digunakan untuk memahami konsep ini. Putnam menjelaskan bahwa modal sosial merupakan jaringan hubungan sosial, norma, dan kepercayaan yang mendorong masyarakat untuk bekerja sama demi tujuan bersama.⁵³ Dalam pandangan Putnam, keberhasilan suatu komunitas dalam menjaga stabilitas sosial dan politik sangat bergantung pada seberapa kuat kepercayaan dan jaringan sosial yang mereka miliki. Masyarakat yang memiliki modal sosial tinggi biasanya lebih solid, lebih mudah berkoordinasi, dan lebih mampu menghadapi perbedaan tanpa menimbulkan konflik.

Kalau melihat kehidupan masyarakat Bojong Kulur, teori ini tampak sangat relevan. Masyarakat di sana memiliki jaringan sosial yang kuat melalui kegiatan seperti kerja bakti, pengajian, atau musyawarah lingkungan. Dalam kegiatan tersebut, warga saling berinteraksi, saling membantu, dan memperkuat hubungan sosial tanpa mempermasalahkan perbedaan politik. Mereka sadar bahwa hidup rukun jauh lebih penting dibanding mempertahankan ego politik masing-masing. Dari sinilah nilai-nilai sosial seperti *rukun*, *gotong royong*, dan *tepa selira* menjadi bagian penting dari modal sosial yang menjaga keharmonisan sosial.

Dalam konteks ini, modal sosial memiliki beberapa unsur penting, yaitu jaringan sosial, norma sosial, dan kepercayaan sosial. Jaringan sosial menjadi ruang di mana interaksi berlangsung. Norma sosial menjadi panduan perilaku agar setiap

⁵³ Robert D. Putnam, *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy* (Princeton: Princeton University Press, 1993)

individu tidak bertindak semauanya sendiri. Sedangkan kepercayaan sosial menjadi dasar emosional yang membuat hubungan itu bertahan lama. Ketiga hal ini bekerja secara bersamaan dan saling menguatkan. Ketika jaringan sosial aktif, norma akan semakin kuat, dan kepercayaan tumbuh di antara warga. Sebaliknya, jika salah satu unsur melemah, hubungan sosial juga bisa menjadi renggang.

Putnam juga membedakan dua jenis modal sosial, yaitu *bonding social capital* dan *bridging social capital*. *Bonding* mengacu pada hubungan yang terjalin di antara orang-orang yang memiliki kesamaan, seperti sesama tetangga, teman pengajian, atau warga satu lingkungan. Hubungan ini memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas di dalam kelompok. Sementara itu, *bridging* adalah hubungan yang menjembatani kelompok berbeda agar bisa bekerja sama. Dalam konteks Bojong Kulur, *bonding* terlihat dalam kegiatan sosial yang mempererat hubungan internal warga, sedangkan *bridging* terlihat ketika warga yang berbeda pandangan politik tetap bisa berkolaborasi dalam kegiatan bersama tanpa membicarakan perbedaan tersebut.

Kedua bentuk modal sosial ini sama-sama berperan penting dalam menjaga toleransi politik. *Bonding* menciptakan rasa aman dan kebersamaan, sementara *bridging* membantu masyarakat tetap terbuka terhadap perbedaan. Dalam kehidupan sehari-hari, kedua bentuk ini sering kali berjalan bersamaan dan saling melengkapi. Ketika warga bekerja sama membersihkan lingkungan, mereka tidak lagi berpikir siapa mendukung siapa dalam politik, tetapi lebih fokus pada tujuan bersama untuk menjaga kenyamanan lingkungan mereka.

Selain menjadi sarana untuk memperkuat hubungan sosial, modal sosial juga berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial. Di masyarakat Bojong Kulur, misalnya, warga memiliki cara-cara halus untuk mengingatkan atau menegur seseorang yang dianggap melanggar nilai kebersamaan. Hal ini tidak dilakukan melalui peraturan formal, tetapi lewat teguran ringan, candaan, atau bahkan sekadar perubahan sikap sosial. Mekanisme seperti ini membantu menjaga agar norma tetap dipatuhi tanpa menciptakan konflik terbuka.

Modal sosial juga berfungsi menjaga stabilitas sosial di tengah perbedaan politik. Ketika suasana politik nasional sedang panas, masyarakat Bojong Kulur justru cenderung menahan diri. Mereka tidak membawa perbedaan itu ke lingkungan sosial, karena sudah ada kesadaran bersama bahwa hubungan antartetangga jauh lebih penting dibanding perdebatan politik yang sifatnya sementara. Kesadaran ini tumbuh karena adanya nilai sosial yang sudah lama hidup dan diwariskan dalam kehidupan sehari-hari.

1.7 Hubungan Antar Konsep

Hubungan antar konsep dalam penelitian ini disusun untuk memperjelas keterkaitan antara teori, konteks sosial, serta hasil empiris yang menjadi fokus kajian. Kerangka ini berupaya menunjukkan bagaimana teori interaksionisme simbolik yang dikembangkan oleh George Herbert Mead dan Herbert Blumer berinteraksi dengan konsep toleransi politik, masyarakat sebagai entitas sosial-politik, serta konteks

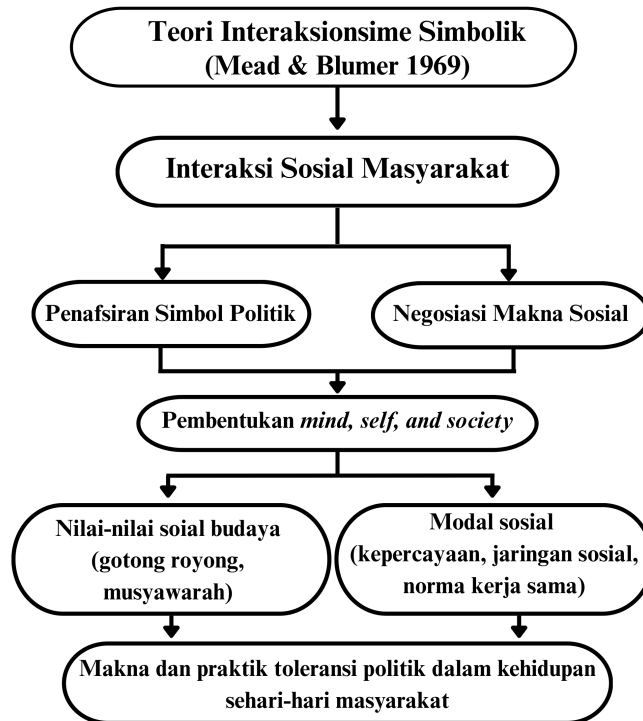
pemilihan umum sebagai ruang interaksi politik. Dengan kata lain, hubungan antar konsep ini menggambarkan alur berpikir penelitian mulai dari landasan teoritis, proses sosial, hingga pada terbentuknya makna dan praktik toleransi politik di masyarakat Desa Bojong Kulur.

Dalam hubungan ini, teori interaksionisme simbolik menjadi fondasi analisis yang menjelaskan bagaimana makna politik dibentuk melalui interaksi sosial. Proses sosial ini tidak berlangsung dalam ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh konteks sosial budaya masyarakat yang ditandai dengan nilai-nilai gotong royong, musyawarah, serta tingkat keaktifan warga dalam kegiatan sosial dan politik.



Intelligentia - Dignitas

Skema 1.2 Hubungan Antar Konsep



Sumber: Olah Data Peneliti 2025

Skema hubungan antar konsep di atas (skema 1.2) merupakan penyederhanaan dari keseluruhan alur berpikir penelitian ini. Skema tersebut menggambarkan arah hubungan utama antara teori interaksionisme simbolik, proses interaksi sosial, nilai sosial budaya, hingga pada praktik toleransi politik di masyarakat Desa Bojong Kulur. Namun dalam penjelasan berikut, keterkaitan antar unsur tersebut diuraikan secara lebih mendalam dengan menambahkan dimensi sosial-kultural dan empiris yang menjadi konteks penting dalam membentuk makna dan praktik toleransi politik di tingkat lokal. Dengan cara ini, hubungan antar konsep yang sederhana dalam skema

tetap konsisten secara teoritis, namun memperoleh penjelasan yang lebih kaya dan komprehensif.

Hubungan antar konsep dalam penelitian ini menunjukkan keterkaitan yang erat antara teori, konteks sosial, dan praktik empiris yang membentuk fenomena toleransi politik di masyarakat Desa Bojong Kulur. Hubungan ini tidak bersifat linier, melainkan interaktif dan dinamis, karena setiap konsep saling mempengaruhi dan membentuk satu sama lain melalui proses sosial yang terus berlangsung. Secara umum, hubungan antar konsep tersebut dapat dijelaskan melalui tiga tataran analisis utama: tataran teoritis (interaksionisme simbolik), tataran sosial-kultural (nilai sosial dan modal sosial), serta tataran empiris (praktik toleransi politik dalam kehidupan masyarakat).

Secara teoritis, teori interaksionisme simbolik yang dikembangkan oleh George Herbert Mead dan diperluas oleh Herbert Blumer menjadi fondasi konseptual yang menjelaskan bagaimana makna sosial terbentuk dan direproduksi melalui interaksi antarindividu. Menurut Mead, manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna yang mereka berikan pada objek tersebut, dan makna ini lahir dari interaksi sosial yang bersifat simbolik.⁵⁴ Dengan demikian, pemahaman seseorang terhadap realitas sosial termasuk realitas politik tidak bersifat objektif, melainkan dibentuk oleh proses komunikasi, interpretasi, dan refleksi sosial. Dalam konteks penelitian ini, teori interaksionisme simbolik menjelaskan bagaimana warga Bojong

⁵⁴ Mead, G. H. (1934). *Mind, Self, and Society*. Chicago: University of Chicago Press..

Kulur membangun makna mengenai toleransi politik melalui pertukaran simbol dan pengalaman kolektif dalam kehidupan sehari-hari.

Blumer menegaskan bahwa makna sosial tidak pernah statis, melainkan senantiasa dinegosiasikan dan disempurnakan dalam proses interaksi sosial.⁵⁵ Artinya, sikap dan perilaku politik warga bukanlah hasil dari faktor struktural semata seperti aturan negara atau sistem politik, tetapi merupakan hasil dari proses interpretasi simbolik yang terus berlangsung. Proses tersebut terlihat ketika warga menafsirkan perbedaan politik bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai bagian dari dinamika sosial yang wajar dalam kehidupan demokratis. Dengan kata lain, teori interaksionisme simbolik menjadi lensa analitis untuk memahami bagaimana masyarakat Bojong Kulur memaknai perbedaan pilihan politik melalui proses interaksi dan komunikasi yang berlangsung di lingkungannya.

Dalam dimensi sosial-kultural yang menjelaskan faktor-faktor yang memperkuat atau menopang terbentuknya makna toleransi politik. Dalam masyarakat Bojong Kulur, nilai-nilai budaya seperti gotong royong, musyawarah, dan tepa selira menjadi fondasi moral yang menjaga harmoni sosial di tengah perbedaan politik. Nilai-nilai ini berfungsi sebagai bagian dari modal sosial sebagaimana dikemukakan oleh Robert D. Putnam, yang mendefinisikan modal sosial sebagai jaringan, norma,

⁵⁵ Blumer, H. (1969). *Symbolic Interactionism: Perspective and Method*. Berkeley: University of California Press.

dan kepercayaan yang memfasilitasi koordinasi dan kerja sama untuk kepentingan bersama.⁵⁶

Dalam konteks ini, modal sosial bekerja melalui mekanisme kepercayaan (*trust*) dan hubungan sosial (*civic engagement*) yang memungkinkan warga untuk saling menghormati dan berkolaborasi, bahkan ketika mereka memiliki perbedaan pilihan politik. Keberadaan modal sosial yang kuat menjadikan interaksi antarwarga tidak hanya sekadar hubungan fungsional, tetapi juga hubungan emosional yang berlandaskan rasa saling percaya dan solidaritas. Nilai-nilai budaya dan norma sosial yang telah melembaga di masyarakat Bojong Kulur menjelma menjadi instrumen penting yang mencegah konflik politik, memperkuat integrasi sosial, dan menumbuhkan kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga toleransi politik dalam kehidupan sehari-hari.

Secara empiris, hubungan antar konsep diwujudkan dalam praktik toleransi politik di masyarakat. Hasil dari interaksi simbolik dan dukungan nilai sosial-budaya menghasilkan bentuk-bentuk nyata dari sikap toleran, seperti kesediaan warga untuk berpartisipasi bersama dalam kegiatan sosial tanpa mempermasalahkan perbedaan politik, kemampuan mengendalikan emosi saat terjadi perdebatan politik, serta kecenderungan untuk menghindari konflik melalui komunikasi yang santun dan terbuka.⁵⁷ Praktik ini mencerminkan bahwa toleransi politik di Bojong Kulur bukan

⁵⁶ Putnam, R. D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton: Princeton University Press.

⁵⁷ Gibson, J. L. (1992). *Alternative Measures of Political Tolerance: Must Tolerance Be "Least-Liked"?* *American Journal of Political Science*, 36(2), 560–577.

hanya ideal normatif, tetapi juga produk sosial yang hidup dan terus diperkuat melalui pengalaman bersama.

Selain itu, hubungan antar konsep ini juga menunjukkan adanya keterkaitan erat antara struktur sosial dan kesadaran politik masyarakat. Masyarakat yang memiliki jaringan sosial yang kuat dan terbuka terhadap keberagaman cenderung lebih mampu menginternalisasi nilai-nilai toleransi politik. Sebaliknya, masyarakat dengan struktur sosial tertutup dan homogen memiliki potensi lebih besar terhadap munculnya sikap eksklusif dan intoleran.⁵⁸ Oleh karena itu, dalam penelitian ini, struktur sosial dan nilai-nilai budaya dipahami sebagai variabel kontekstual yang membentuk dan memperkuat makna toleransi politik di tingkat lokal.

Dengan demikian, hubungan antar konsep dalam penelitian ini membentuk suatu alur berpikir yang integratif: teori interaksionisme simbolik menjelaskan bagaimana makna politik dikonstruksi melalui interaksi simbolik, nilai sosial-budaya dan modal sosial menjelaskan mengapa makna tersebut dapat bertahan dan diterima oleh masyarakat, sementara praktik toleransi politik menunjukkan bentuk konkret dari hasil proses sosial tersebut. Keseluruhan hubungan ini menegaskan bahwa toleransi politik bukanlah entitas yang berdiri sendiri, melainkan hasil dialektika antara kesadaran individu, interaksi sosial, dan struktur budaya yang membingkai kehidupan masyarakat Bojong Kulur.⁵⁹

⁵⁸ Almond, G. A., & Verba, S. (1963). *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Princeton: Princeton University Press.

⁵⁹ Ritzer, G., & Goodman, D. J. (2004). *Sociological Theory*. New York: McGraw-Hill.

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Pendekatan dan Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-interpretatif, karena bertujuan memahami makna sosial dibalik tindakan masyarakat dalam mempraktikkan toleransi politik selama dan setelah pemilihan umum di Desa Bojong Kulur. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya memahami bagaimana toleransi politik dibangun, dinegosiasikan, dan dimaknai oleh warga Desa Bojong Kulur melalui interaksi sosial sehari-hari. Fenomena toleransi politik tidak dapat diukur hanya melalui angka atau variabel kuantitatif, melainkan memerlukan pemahaman mendalam terhadap pengalaman, penafsiran, serta konteks sosial yang melingkupinya. Sejalan dengan pandangan Creswell, pendekatan kualitatif tepat digunakan ketika peneliti ingin menangkap makna yang dikonstruksikan oleh partisipan melalui perspektif mereka sendiri.⁶⁰

Selain itu, Bogdan dan Taylor menegaskan bahwa pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memahami tindakan sosial secara holistik melalui pengamatan langsung, wawancara mendalam, dan interpretasi situasional.⁶¹ Dengan demikian, pendekatan kualitatif relevan untuk menelaah

⁶⁰ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, (California: Sage Publications, 2014).

⁶¹ Robert Bogdan & Steven J. Taylor, *Qualitative Research Methods: A Sourcebook of New Methods*, (Boston: Allyn and Bacon, 1975).

praktik toleransi politik dalam masyarakat yang multikultural seperti Bojong Kulur, di mana nilai, norma, pengalaman, dan dinamika hubungan sosial menjadi aspek penting dalam membentuk harmoni politik di tengah perbedaan pilihan. Pendekatan ini juga sejalan dengan kerangka teoritis interaksionisme simbolik yang digunakan dalam penelitian, yang menekankan pentingnya makna dan proses interaksi dalam memahami tindakan manusia.⁶²

Neuman menegaskan bahwa penelitian kualitatif berfokus pada *meaning in context*, yakni memahami tindakan sosial berdasarkan makna yang diberikan oleh pelaku sosial dalam situasi nyata. Dalam konteks ini, peneliti berperan aktif untuk menangkap makna subjektif yang muncul dari interaksi antarwarga selama masa pemilu, baik dalam kegiatan sosial, diskusi informal, maupun aktivitas komunitas. Oleh karena itu, proses penelitian dilakukan secara alami (*natural setting*), di mana peneliti turun langsung ke lapangan untuk berinteraksi, mengamati, dan berdialog dengan warga tanpa memaksakan kategori atau asumsi teoritis yang kaku.

Metodologi penelitian ini mengacu pada prinsip-prinsip utama penelitian kualitatif sebagaimana dijelaskan oleh Neuman, yaitu bersifat induktif, interaktif, dan reflektif. Pendekatan induktif berarti teori dibangun dari bawah ke atas (*bottom-up*), melalui temuan empiris yang kemudian

⁶² George Herbert Mead, *Mind, Self and Society*, (Chicago: University of Chicago Press, 1934); Herbert Blumer, *Symbolic Interactionism: Perspective and Method*, (California: University of California Press, 1969).

ditafsirkan untuk membentuk pemahaman konseptual. Interaktif berarti peneliti terlibat dalam hubungan dialogis dengan informan untuk menggali makna sosial secara mendalam. Sementara reflektif menunjukkan kesadaran peneliti terhadap posisi dan nilai-nilainya sendiri dalam proses penelitian.

Dalam penelitian ini, terdapat tiga teknik utama yang digunakan dalam pengumpulan data, yaitu wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Ketiga teknik ini digunakan secara terpadu agar data yang diperoleh tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga mampu menggambarkan makna sosial yang mendasari praktik toleransi politik masyarakat.

a. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam dilakukan terhadap informan yang dipilih berdasarkan keterlibatan mereka dalam kehidupan sosial politik di Jatiasih, seperti tokoh masyarakat, pemuka agama, anggota karang taruna, pemuda, dan ibu rumah tangga. Wawancara ini bersifat semi-terstruktur, di mana peneliti menggunakan pedoman wawancara namun tetap memberi ruang bagi informan untuk mengembangkan jawaban secara bebas sesuai pengalaman mereka. Tujuan wawancara bukan untuk mencari keseragaman pendapat, melainkan menggali beragam perspektif dan pengalaman yang membentuk makna toleransi politik di masyarakat. Proses wawancara dilakukan di lingkungan sosial yang familiar bagi informan, agar mereka dapat berbicara secara

terbuka dan reflektif. Hasil wawancara direkam dan dicatat dalam *field notes* untuk dianalisis secara tematik.

b. Observasi

Teknik observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung perilaku sosial dan interaksi warga dalam berbagai konteks, seperti kegiatan masyarakat, pertemuan warga, dan aktivitas sosial sehari-hari. Observasi dilakukan secara non-partisipatif, artinya peneliti hadir sebagai pengamat tanpa turut mempengaruhi situasi sosial yang diamati. Melalui observasi, peneliti berusaha memahami dinamika sosial yang mungkin tidak terungkap melalui wawancara, seperti gestur, ekspresi, atau pola komunikasi antarwarga yang menunjukkan bentuk-bentuk nyata dari toleransi politik. Observasi lapangan juga membantu peneliti membangun pemahaman yang kontekstual mengenai situasi sosial masyarakat Jatiasih, terutama terkait bagaimana perbedaan pilihan politik direspon dalam kehidupan sehari-hari.

c. Dokumentasi

Selain wawancara dan observasi, penelitian ini juga menggunakan dokumentasi sebagai sumber data pendukung. Dokumen yang dikumpulkan meliputi arsip kegiatan masyarakat, foto kegiatan sosial selama masa pemilu, berita lokal, serta catatan kegiatan

organisasi warga yang relevan dengan tema penelitian. Dokumentasi ini berfungsi untuk memperkuat data yang diperoleh dari wawancara dan observasi, sekaligus menjadi sarana untuk melakukan verifikasi informasi (triangulasi data). Sejalan dengan pandangan Neuman, penggunaan dokumen dalam penelitian kualitatif tidak hanya sebagai bukti administratif, tetapi sebagai teks sosial yang mencerminkan nilai dan makna dalam kehidupan masyarakat.

d. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah masyarakat Desa Bojong Kulur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, yang memiliki pengalaman dalam kehidupan sosial politik di tingkat lokal, terutama mereka yang berinteraksi langsung dalam suasana perbedaan pilihan politik selama pemilihan umum. Penelitian ini dilakukan setahun setelah pemilihan umum berlangsung, dengan tujuan untuk memahami bagaimana masyarakat Jatiasih memaknai kembali pengalaman politiknya, khususnya dalam hal menjaga sikap toleransi terhadap warga lain yang memiliki perbedaan pandangan politik. Fokus utama penelitian ini bukan pada proses kampanye atau hasil pemilu, tetapi pada sikap sosial dan praktik toleransi masyarakat terhadap perbedaan pilihan calon presiden, wakil presiden, dan anggota dewan yang mungkin berlatar belakang berbeda dari sisi agama, suku, ras, atau gender.

Dalam pendekatan kualitatif, subjek penelitian tidak ditentukan berdasarkan jumlah yang pasti, melainkan berdasarkan kedalaman pengalaman dan kemampuan informan untuk menjelaskan makna di balik fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan keterlibatan mereka dalam dinamika sosial masyarakat Jatiasih selama masa pemilu, serta kemampuan mereka untuk merefleksikan bagaimana perbedaan politik direspon secara sosial.

Informan penelitian terdiri dari tokoh masyarakat, pemuka agama, anggota karang taruna, pemuda, dan ibu rumah tangga. Pemilihan informan dengan latar sosial yang beragam ini bertujuan agar peneliti dapat menangkap makna toleransi politik dari berbagai posisi sosial. Tokoh masyarakat dan pemuka agama dipilih karena mereka memiliki pengaruh moral dan sosial yang signifikan terhadap warga sekitarnya. Dalam masyarakat yang majemuk seperti Jatiasih, tokoh-tokoh ini sering kali menjadi rujukan bagi warga dalam menyikapi perbedaan pandangan politik. Mereka juga berperan sebagai penjaga harmoni sosial ketika potensi ketegangan politik muncul di tengah masyarakat.

Sementara itu, pemuda dan anggota karang taruna dilibatkan karena mereka mewakili generasi yang aktif dalam interaksi sosial dan

media digital selama masa pemilu. Melalui mereka, peneliti dapat memahami bagaimana wacana politik, isu identitas sosial, dan sikap terhadap keberagaman diekspresikan dalam ruang publik maupun percakapan daring.

Adapun ibu rumah tangga dijadikan informan karena mereka berperan penting dalam menjaga kohesi sosial di tingkat keluarga dan lingkungan sekitar. Dalam masyarakat Jatiasih, ibu rumah tangga sering menjadi penghubung sosial antar keluarga dengan perbedaan pilihan politik. Perspektif mereka memberikan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana toleransi dipraktikkan di ranah domestik maupun komunitas lokal.

Pemilihan informan dilakukan secara alamiah dan bertahap, di mana peneliti mengenali individu yang dianggap relevan dengan fokus penelitian berdasarkan rekomendasi warga lain. Proses ini terus berlanjut hingga peneliti menemukan kejenuhan data (data saturation) yaitu ketika tidak ada lagi informasi baru yang muncul dari lapangan.

Pendekatan seperti ini mencerminkan karakter penelitian kualitatif yang menempatkan informan sebagai pemilik makna sosial, bukan sebagai objek yang diukur, melainkan sebagai subjek yang diajak berdialog untuk membangun pemahaman bersama. Dengan

demikian, pemilihan informan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang holistik tentang praktik toleransi politik masyarakat Jatiasih di tengah keragaman sosial, budaya, dan identitas politik yang mereka miliki.

1.8.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bojong Kulur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Wilayah ini dipilih karena memiliki karakteristik masyarakat yang majemuk dengan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya yang beragam. Masyarakat Jatiasih terdiri dari berbagai etnis seperti Betawi, Jawa, Sunda, dan Minangkabau, serta memiliki keragaman agama dan tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Keberagaman ini menjadikan Jatiasih menarik sebagai lokasi penelitian karena menggambarkan realitas sosial masyarakat perkotaan yang kompleks dan dinamis. Dalam konteks pemilihan umum, wilayah ini menjadi ruang sosial tempat warga berinteraksi, berdebat, dan menegosiasikan perbedaan pilihan politik. Oleh karena itu, Jatiasih menjadi lokasi yang relevan untuk meneliti bagaimana masyarakat menjaga toleransi politik di tengah perbedaan tersebut. Pemilihan lokasi penelitian tidak dilakukan secara acak atau untuk tujuan representatif, melainkan berdasarkan pertimbangan makna sosial dan relevansi fenomena. Pendekatan seperti ini sesuai dengan pandangan Neuman bahwa penelitian kualitatif menekankan pemilihan konteks sosial yang kaya akan makna dan memungkinkan

pemahaman mendalam terhadap pengalaman manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan, yaitu dari September hingga November 2025. Tahap pertama, peneliti melakukan observasi awal dan pendekatan sosial kepada warga Jatiasih untuk memahami konteks sosial dan membangun kepercayaan. Tahap kedua, peneliti melakukan wawancara mendalam serta observasi terhadap kegiatan sosial masyarakat. Tahap ketiga, peneliti menganalisis dan menafsirkan data yang telah terkumpul. Pembagian waktu ini bersifat lentur karena dalam penelitian kualitatif, kedalaman data lebih diutamakan dibanding lamanya waktu penelitian.

1.8.4 Peran Penulis

Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang mengarahkan seluruh proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data. Peneliti tidak hanya berfungsi sebagai pengamat, tetapi juga sebagai penafsir makna sosial dari fenomena yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, peneliti berperan aktif untuk memahami cara masyarakat Jatiasih membangun dan mempertahankan toleransi politik di tengah keragaman pilihan politik.

Peneliti berperan sebagai pengamat sosial non-partisipatif, yang berarti peneliti hadir di tengah masyarakat untuk memahami perilaku sosial tanpa

turut memengaruhi atau mengintervensi situasi. Melalui observasi dan wawancara, peneliti mendengarkan secara aktif, memahami konteks lokal, dan menafsirkan makna tindakan sosial masyarakat berdasarkan cara pandang mereka sendiri. Pendekatan ini menuntut reflektivitas, yaitu kesadaran diri peneliti terhadap nilai-nilai pribadi yang mungkin memengaruhi interpretasi data.

Neuman menegaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah bagian dari dunia sosial yang diteliti. Oleh karena itu, penting bagi peneliti untuk menjaga jarak analitis agar dapat menafsirkan makna sosial dengan objektif, tanpa kehilangan empati terhadap pengalaman informan.

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan prinsip dasar pendekatan kualitatif, yakni proses pengumpulan informasi yang dilakukan secara alami, reflektif, dan mendalam. Dalam penelitian kualitatif, data tidak diperoleh melalui instrumen terstandar seperti angket atau survei, tetapi melalui interaksi langsung antara peneliti dan subjek penelitian dalam konteks sosial yang nyata.⁶³ Seluruh data penelitian ini dikumpulkan melalui serangkaian kegiatan lapangan yang bersifat interpretatif dan partisipatif terbatas, dengan peneliti berperan aktif untuk memahami makna tindakan

⁶³ W. Lawrence Neuman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, 7th ed. (Boston: Pearson Education, 2014), hlm. 146.

sosial masyarakat Jatiasih selama dan setelah pemilihan umum berlangsung. Proses pengumpulan data dilakukan melalui tiga bentuk kegiatan utama yang telah dijelaskan pada subbab 1.8.1, yaitu wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Ketiga teknik tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi untuk memperkaya pemahaman peneliti terhadap fenomena sosial yang diteliti.⁶⁴

Data yang terkumpul dari wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian dicatat dalam catatan lapangan (*field notes*) untuk memastikan setiap temuan dapat ditelusuri dan dianalisis secara sistematis. Selama proses ini, peneliti menjaga keterbukaan terhadap makna baru yang mungkin muncul di lapangan. Sesuai dengan pandangan Neuman, pengumpulan data dalam penelitian kualitatif bersifat siklikal dan reflektif, artinya peneliti dapat kembali ke lapangan untuk memperdalam pemahaman atau memverifikasi informasi apabila ditemukan ketidaksesuaian data. Selain itu, peneliti menerapkan prinsip keabsahan data melalui proses perbandingan lintas sumber dan lintas waktu. Hasil wawancara dibandingkan dengan hasil observasi maupun dokumentasi untuk melihat kesesuaian makna dan konsistensi informasi. Dengan demikian, pengumpulan data tidak hanya dimaknai sebagai aktivitas teknis, tetapi juga sebagai proses sosial yang

⁶⁴ Ibid., hlm. 173–175..

membangun pemahaman kontekstual dan interpretatif terhadap fenomena toleransi politik masyarakat Jatiasih.

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan secara empiris, sistematis, dan bertahap, sesuai dengan prinsip dasar teori interaksionisme simbolik yang dikembangkan oleh George Herbert Mead dan Herbert Blumer. Analisis data dilakukan dengan berangkat dari data lapangan yang bersumber dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Seluruh data tersebut diolah melalui proses interpretatif untuk menemukan makna sosial yang terkandung di dalamnya, terutama makna mengenai praktik dan pemahaman toleransi politik di masyarakat Desa Bojong Kulur.

Secara umum, proses pengolahan data dilakukan dalam tiga tahapan analisis makna sosial, yaitu tahap identifikasi makna (*open coding*), tahap pengelompokan makna (*axial coding*), dan tahap penafsiran simbolik (*selective coding*). Ketiga tahap ini digunakan bukan dalam kerangka grounded theory, melainkan sebagai bentuk adaptasi dari pendekatan empiris dalam interaksionisme simbolik, di mana makna dibangun melalui proses reflektif dan interaksi simbolik antar individu. Pada tahap identifikasi makna, peneliti membaca secara menyeluruh seluruh data hasil wawancara dan observasi untuk menemukan pernyataan, simbol, atau tindakan sosial yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian. Tahap ini bertujuan untuk mengenali simbol-simbol sosial yang muncul dalam kehidupan sehari-hari

masyarakat, seperti cara warga mengekspresikan pandangan politik, berinteraksi dengan tetangga berbeda pilihan, serta menafsirkan nilai-nilai sosial seperti gotong royong dan musyawarah. Mead menjelaskan bahwa makna dari setiap tindakan manusia muncul melalui proses interaksi simbolik, di mana individu belajar memahami dirinya dan orang lain melalui komunikasi sosial.⁶⁵ Setelah simbol-simbol sosial diidentifikasi, peneliti melanjutkan ke tahap pengelompokan makna. Tahap ini berfungsi untuk menghubungkan antar-simbol dan menyusun kategori yang lebih luas berdasarkan tema yang muncul dari data. Misalnya, simbol “berbagi makanan saat kegiatan kampanye” atau “tetap ikut gotong royong dengan tetangga beda partai” dikelompokkan dalam tema besar seperti *solidaritas sosial di tengah perbedaan politik*. Pada tahap ini, analisis dilakukan dengan memperhatikan konteks sosial dan relasi antarwarga sebagaimana dijelaskan oleh Blumer, bahwa makna sosial tidak bersifat tunggal, melainkan dibentuk melalui interaksi yang berulang dan saling mempengaruhi antar individu.

Tahap terakhir adalah penafsiran simbolik, yaitu proses menafsirkan kategori makna sosial yang telah ditemukan menjadi sebuah konstruksi konseptual yang utuh. Peneliti merefleksikan kembali seluruh hasil pengelompokan data dengan teori interaksionisme simbolik untuk memahami bagaimana makna toleransi politik dibangun dan dijaga oleh masyarakat

⁶⁵ Ibid.

Bojong Kulur dalam kehidupan sehari-hari.⁶⁶ Proses ini mencerminkan konsep *mind, self, and society* dari Mead (1934), di mana individu membangun kesadaran sosial melalui kemampuan reflektifnya terhadap simbol dan tindakan sosial di lingkungannya.

Seluruh proses pengolahan data dilakukan secara siklikal dan empiris, artinya peneliti dapat kembali ke tahap sebelumnya bila ditemukan makna baru dari data. Pendekatan ini memungkinkan hasil analisis tetap fleksibel dan terbuka terhadap penemuan makna sosial yang dinamis. Blumer menegaskan bahwa makna yang muncul dari interaksi sosial bersifat terus berubah sesuai dengan konteks hubungan antarindividu.⁶⁷ Oleh karena itu, analisis dalam penelitian ini tidak berhenti pada pengelompokan data secara deskriptif, tetapi menekankan pada proses interpretatif yang mendalam untuk memahami makna sosial di balik setiap tindakan dan simbol yang ditemukan di lapangan.

Dengan teknik pengolahan data seperti ini, penelitian dapat menggambarkan bagaimana makna toleransi politik terbentuk melalui pengalaman sosial masyarakat, bukan hanya melalui pandangan individual. Pendekatan empiris yang dilakukan memastikan bahwa analisis benar-benar berpijak pada data nyata, sekaligus menghubungkannya dengan

⁶⁶ Mead, G. H. (1934). *Mind, Self, and Society*. Chicago: University of Chicago Press.

⁶⁷ Blumer, H. (1969). *Symbolic Interactionism: Perspective and Method*. Berkeley: University of California Press.

konsep-konsep utama dalam teori interaksionisme simbolik yang menjadi landasan penelitian ini.

1.8.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara induktif dan interpretatif, yaitu berangkat dari data lapangan menuju pada pemahaman konsep dan makna sosial. Pendekatan ini digunakan agar peneliti dapat menangkap pengalaman subjektif masyarakat Jatiasih dalam menyikapi perbedaan pilihan politik, baik pada masa pemilu maupun dalam interaksi sosial sehari-hari setelahnya. Proses analisis dilakukan secara berkesinambungan dengan pengumpulan data, sebagaimana dijelaskan Neuman, bahwa dalam penelitian kualitatif proses analisis dimulai sejak peneliti memasuki lapangan, mengumpulkan data, hingga penulisan laporan akhir.⁶⁸ Analisis tidak bersifat linier, melainkan siklikal dan reflektif, di mana peneliti terus meninjau ulang temuan untuk memastikan kesesuaian makna dengan konteks sosialnya.

Tahapan analisis mengacu pada model Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti menyaring data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk menemukan tema-tema penting

⁶⁸Ibid., hlm. 195.

seperti makna toleransi politik, peran sosial warga, dan nilai-nilai budaya yang menopang harmoni sosial. Tahap penyajian data dilakukan dengan menyusun narasi tematik, tabel, dan peta konseptual untuk menunjukkan keterkaitan antar tema yang ditemukan di lapangan.

Tahap penarikan dan verifikasi kesimpulan dilakukan dengan menafsirkan pola makna sosial yang muncul dari data lapangan. Kesimpulan tidak ditarik secara tiba-tiba, melainkan melalui proses verifikasi berulang dengan membandingkan data antar sumber serta mengkonfirmasi hasil interpretasi kepada beberapa informan (*member checking*). Melalui tahapan ini, peneliti berupaya menjaga keabsahan dan kredibilitas hasil penelitian. Analisis ini tidak hanya menghasilkan deskripsi tentang bagaimana toleransi politik dipraktikkan, tetapi juga mengungkap makna yang terkandung di balik tindakan sosial masyarakat dalam menjaga harmoni di tengah perbedaan pilihan politik. Sejalan dengan pandangan Neuman, tujuan analisis kualitatif adalah untuk memahami dunia sosial dari perspektif pelaku sosial itu sendiri, bukan untuk menggeneralisasi, tetapi untuk menggali makna mendalam dari pengalaman manusia.

1.8.7 Teknik Triangulasi Data

Dalam penelitian kualitatif, triangulasi data merupakan teknik penting yang digunakan untuk menguji keabsahan temuan dan meningkatkan

kepercayaan terhadap hasil penelitian. Menurut Neuman, triangulasi berarti menggunakan berbagai sumber, metode, atau perspektif untuk memeriksa konsistensi temuan penelitian, sehingga interpretasi yang dihasilkan menjadi lebih kuat dan dapat dipercaya.⁶⁹ Penelitian ini menggunakan tiga bentuk triangulasi, yaitu triangulasi sumber data, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

1. Triangulasi sumber data dilakukan dengan cara membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan yang memiliki latar sosial berbeda, seperti tokoh masyarakat, pemuka agama, pemuda, dan ibu rumah tangga. Melalui perbandingan ini, peneliti dapat melihat sejauh mana pandangan mereka mengenai toleransi politik memiliki kesamaan atau perbedaan yang bermakna.
2. Triangulasi teknik dilakukan dengan mengkombinasikan hasil wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Ketiga teknik ini digunakan secara terpadu untuk saling melengkapi dan memperkuat data. Misalnya, hasil wawancara diverifikasi melalui catatan observasi, sementara dokumentasi digunakan untuk mengonfirmasi kebenaran peristiwa atau kegiatan sosial yang disebutkan oleh informan.

⁶⁹ Lawrence Neuman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, 7th ed. (Boston: Pearson Education, 2014), hlm. 189.

3. Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengumpulan data pada waktu yang berbeda, baik pada siang maupun malam hari, serta dalam konteks kegiatan sosial yang beragam, untuk memastikan bahwa data yang diperoleh tidak bersifat situasional. Hal ini penting karena persepsi dan perilaku sosial dapat berubah tergantung pada konteks dan waktu pengamatan.

Melalui penerapan ketiga bentuk triangulasi ini, peneliti berupaya menjaga validitas internal (kredibilitas) penelitian. Proses ini memastikan bahwa hasil penelitian benar-benar mencerminkan realitas sosial masyarakat Jatiasih dan bukan semata-mata hasil interpretasi subjektif peneliti. Neuman menegaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, keabsahan data tidak diukur dengan angka atau reliabilitas statistik, melainkan dengan kedalaman pemahaman, konsistensi makna, dan kejujuran interpretasi terhadap pengalaman sosial informan.

1.9 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan skripsi ini disusun secara terstruktur untuk memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai alur berpikir penelitian, mulai dari latar belakang hingga hasil temuan dan kesimpulan. Secara keseluruhan, skripsi ini terdiri dari lima bab utama yang saling berhubungan.

- **BAB I** : Penjelasan latar belakang masalah, masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan penelitian sejenis, kerangka konseptual, metodologi penelitian, serta sistematika penelitian yang akan dijelaskan dalam bab ini.
- **BAB II** : Pada bab ini dipaparkan gambaran umum mengenai kondisi sosial, budaya, dan politik masyarakat Desa Bojong Kulur sebagai latar penelitian. Pembahasan mencakup profil sosial-ekonomi warga, keragaman agama, etnis, serta komposisi gender. Bab ini juga menjelaskan bentuk-bentuk interaksi sosial masyarakat yang terkait dengan nilai toleransi, serta situasi sosial selama dan setelah pelaksanaan pemilu.
- **BAB III** : Memaparkan hasil temuan lapangan mengenai bagaimana warga Bojong Kulur memaknai dan mempraktikkan toleransi politik. Serta, menjelaskan berbagai bentuk interaksi sosial yang muncul selama berlangsungnya masa pemilu.
- **BAB IV** : Membahas analisis mendalam mengenai faktor-faktor sosial dan budaya yang berperan dalam membentuk atau mempengaruhi tingkat toleransi politik masyarakat. Pembahasan dalam bab ini mengaitkan temuan lapangan dengan teori interaksi simbolik dari Herbert Mead dan Blumer untuk menafsirkan bagaimana makna toleransi terbentuk melalui proses interaksi sosial.
- **BAB V** : Bab ini merupakan penutup dari penelitian yang dilakukan, terdiri dari kesimpulan dan saran.